

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR
15 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(TUPOKSI) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM KERANGKA
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik



OLEH :

Vera Wartabone

NIM: S.310208235

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURABAYA**

2010

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR
15 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(TUPOKSI) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM KERANGKA
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK**



DISUSUN OLEH:

Vera Wartabone

NIM: S.310208235

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S NIP. 194405051969021001	
2. Pembimbing II	Widodo Trisno Novianto, SH.,M.Hum NIP. 195411241985031002	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S
NIP. 194405051969021001

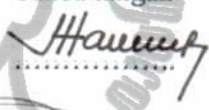



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR
15 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(TUPOKSI) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM KERANGKA
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK**

DISUSUN OLEH:



Vera Wartabone

NIM: S.310208235

Telah disetujui oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.,M.Hum NIP. 195702031985032001	
Sekretaris	Dr. I Gusti Ayu Ketut R H, SH.,MM NIP. 197210082005012001	
Anggota	1. Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S NIP. 194405051969021001	
	2. Widodo Trisno Novianto, SH.,M.Hum NIP. 195411241985031002	

Mengetahui,

Ketua Program Studi	Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS NIP. 194405051969021001	
Direktur Program Pascasarjana	Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D NIP. 195708201985031004	



PERNYATAAN

Nama : Vera Wartabone
NIM : S. S.310208235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: ***“Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Dalam Kerangka Optimalisasi Pelayanan Publik”***, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Januari 2010
Yang membuat pernyataan



Vera Wartabone

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya Rahmat dan Kodrat-Nyalah tesis ini dapat dirampungkan dan diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian tesis pada Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dalam Kerangka Optimalisasi Pelayanan Publik”***, senantiasa menemui kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan, namun karena didorong oleh kemauan dan tanggung jawab sebagai mahasiswa serta bantuan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Olehnya pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak dengan berbagai kesibukannya telah bersedia mengarahkan Tesis ini, semoga pengorbanan dan jasa beliau dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian pula terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta juga sebagai pembimbing dalam penyelesaian penulisan ini.
4. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dosen, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Ayahanda, Ibunda dan Kakak dan adikku yang tercinta yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis sehingga sukses dapat berhasilnya studi penulis.
6. Suamiku dan anak-anak yang tercinta yang begitu besar menantikan keberhasilan yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya berupa doa dan motivasi sehingga berhasilnya studi.
7. Rekan mahasiswa angkatan 2006/2007 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang juga ikut membantu menyumbangkan pikiran, sehingga terlaksana dengan baik tesis ini.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya mempersembahkan tesis ini dengan penuh harapan atas segala kebaikan dan perhatiannya serta bantuan dari semua pihak penulis ucapkan terima kasih semoga mendapat balasan dari Allah Subhanallahuwata'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang dan kita semua tetap berada dalam lindungannya.

Amiin ya rabal'alamien.

Surakarta, Januari 2010
Peneliti

Vera Wartabone

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAM JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN TEORI	 10
A. Otonomi Daerah.....	10
B. Hukum Kebijakan Publik.....	20
C. Teori Bekerjanya Hukum.....	28
D. Kerangka Berpikir	48
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis Data dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data	55
F. Batasan Operasional Variabel Penelitian	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Deskripsi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango	58
a. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango	58
b. Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008	66
c. Bentuk-Bentuk Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango	70
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Pembahasan	71
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2008	71
a. Unsur Struktur Hukum	77
b. Unsur Substansi Hukum	79
c. Unsur kultur Hukum	81
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Implikasi	85
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Struktur Organisasi	65
2. Data Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango	73



DAFTAR BAGAN

1. Seidman..... 42

2. Kerangka Berpikir..... 54



ABSTRAK

VERA WARTABONE, S.310208235, 2009, *Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Dalam Kerangka Optimalisasi Pelayanan Publik*". Tesis : Program Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Dalam Kerangka Optimalisasi Pelayanan Publik. Adapun bentuk penelitian ini yaitu bentuk penelitian diagnostik, dimana penulis ingin mengetahui dan mencari apa sebab-sebab, menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa secara langsung dan mendalam serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga kebijakan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik belum seluruhnya diimplementasikan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Dari segi struktur hukum bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango tidaklah sepenuhnya memiliki kewenangan untuk dalam mengoptimalkan pelayanan publik terhadap tugas pokok dan fungsi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsinya karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri, (b) Dari segi substansi hukum bahwa keberadaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 pada satu sisi dimaksudkan memberikan pengaturan dan kepastian hukum tentang kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap tugas pokok dan fungsinya akan tetapi pada sisi lain mendorong institusi tersebut harus lebih mengoptimalkan pelayanan publik dalam bidang ketenagakerjaan, (c) Dari sudut kultur hukum bahwa keberadaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 bahwa kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam Peraturan Bupati tentang TUPOKSI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dapat dikaji pula dari sistem hukum yang berlaku. Kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut sebagai realitas dalam menuju ke arah optimalnya pelayanan publik.

ABSTRACT

Vera Wartabone, S.310208235, 2009, Implementation of Regent Bone Bolango Regulation No. 15 Year 2008 About Duty and Function (TUPOKSI) Office of Manpower and Transmigration Bone Bolango In Optimization Framework for Public Services ". Thesis: State University Graduate Program in March Eleven Surakarta.

The research objective is achieved in the cold this thesis is to determine Implementation Regulation of Bone Regent Bolango No. 15 Year 2008 About Duty and Function (TUPOKSI) Office of Manpower and Transmigration Bone Bolango In Optimization Framework for Public Service. The shape of this research is the form of diagnostic research, where the writer wanted to know and find what the causes, explore the opinions, ideas, thoughts from the actors directly and in event depth, and what factors that affect that policy in the region optimize public services have not fully implemented in every policy taken by the Local Government Manpower and Transmigration Office Bone Bolango. The results showed that: (a) In terms of legal structure that the Department of Manpower and Transmigration Bone Bolango not have the authority to fully optimize the public service of the main tasks and functions of the conditions set by Government Regulation as a reference in execution of duties, functions for the Office of Manpower and Transmigration has no choice but to accept the mechanism set out in Government Regulation and the Decision of the Minister of Home Affairs, (b) In terms of legal substance that the presence of Regent Regulation No. 15 Year 2008 on one side and intended to provide legal certainty settings on the position of the Office of Manpower and Transmigration of the main tasks and functions but on the other hand it encourages institutions to further optimize the field of public service employment, (c) From the point of law that the existence of culture Regent Regulation No. 15 Year 2008 that the legal rules that contained in the Regulation of TUPOKSI Regent Office of Manpower and Transmigration Bone Bolango can be assessed also from the legal system. The presence of such government regulation as a reality in the direction of optimal public service.